

UKSW Siapkan Kuliah Tatap Muka

**SALATIGA (KR)** - Universitas Kristen Satya Wacana ( UKSW) Salatiga siap laksanakan kuliah tatap muka 100 persen dan mulai menggelar wisuda dengan hadir di kampus, mulai semester 1 tahun 2022/2023. Langkah tersebut mengacu kebijakan nasional dari Dirjen Dikti bahwa mulai semester satu tahun ajaran 2022/20-23 perguruan tinggi menyelenggarakan pertemuan tatap muka seratus persen dan tidak melayani daring.

”Saat ini kami sudah memperbanyak tatap muka, tadinya masih 50 persen, sekarang sudah ada yang 100 persen namun belum semua mata kuliah,” ujar Rektor UKSW Salatiga, Neil Samuel Rupadara SE MSc PhD saat acara halal bihalal dengan wartawan, Selasa (31/5). Menyambut kuliah tatap muka 100 persen yang dimulai pada bulan Agustus mendatang, lanjut Neil, dibutuhkan persiapan-persiapan, baik sosialisasi maupun sarana pendukungnya.

Bangku kelas sudah dikembalikan bangku-bangku dan juga sosialisasi agar semua dosen dan mahasiswa siap untuk tatap muka 100 persen. Neil berharap kondisi pandemi Covid 19 yang sudah terkendali dengan baik akan semakin membaik, dengan melihat angka penderita Covid 19, tingkat keparahan terus mengecil sehingga kebijakan luring atau pertemuan tatap muka bisa dilaksanakan. Pembantu Rektor IV Bidang Kerja Sama Kelembagaan dan Internasionalisasi UKSW Joseph Ernest Mambu SPd, MA, PhD menambahkan, untuk wisuda UKSW bulan Juni 2022 , sudah dilaksanakan langsung hadir di kampus.

”Sejak tahun 2020, wisudanya masih secara daring namun untuk wisuda bulan Juni mendatang, para wisudawan sudah bisa langsung hadir untuk prosesi pemindahan tali toga yang dilakukan oleh rektor. Wisuda berikutnya lagi di bulan Oktober juga dijadwalkan offline. Mudah-mudahan tidak ada kejutan lagi Covid-19 meningkat,” katanya. **(Sus)**

Calhaj Boyolali Terima Koper

**BOYOLALI (KR)** - Sejumlah perwakilan dari calon jemaah haji (Calhaj) di kabupaten Boyolali, Senin (30/5) pagi melakukan pengambilan koper di pusat layanan haji dan umroh kantor Kementerian Agama (Kemenag) Boyolali. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Boyolali, Sauman mengatakan, sebanyak 315 koper mulai dibagikan terhadap para calon jemaah haji melalui kelompok bimbingan haji.

”Koper sampai di kantor Kemenag pada Kamis yang lalu, dan hari ini mulai dibagikan kepada calon jemaah haji. Ya, pembagian ini melalui perwakilan tim,” katanya kepada wartawan, Senin (30/5). Masing-masing kelompok perwakilan jemaah tersebut meliputi, KBIH Alkausar sebanyak 121 koper, Aropah 73 koper, Mandiri 101 koper, MTA 13 koper, KBIH LDII sebanyak 6 koper dan satu koper untuk petugas haji daerah (PHD).

”Yang datang di kantor Kemenag ini dari masing-masing kelompok. Koper masih terbungkus karung,” ujar Sauman. Koper tersebut nantinya akan dibagikan oleh masing masing petugas kelompok haji di setiap daerah di Boyolali. Jadi nanti mereka yang membagikan. Ini di seluruh jemaah yang ada di Boyolali. Para calon jemaah haji Boyolali akan memasuki Asrama Haji Donohudan pada 26 Juni 2022 mendatang. Sementara keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci dijadwalkan pada 27 Juni 2022. **(R-3)**

Sejumlah Desa di Purworejo Diterjang Banjir

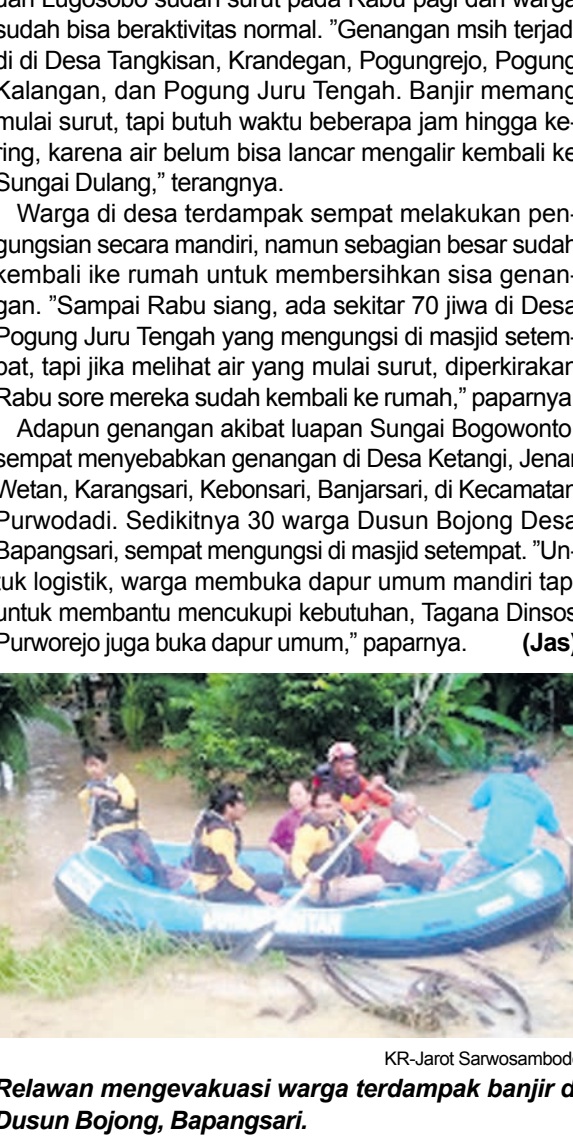
**PURWOREJO (KR)** -Bencana banjir menerjang sejumlah desa di Kabupaten Purworejo, Rabu (1/6). Bencana itu terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (31/5) petang, hingga Rabu (1/7) dini hari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo Budi Wibowo mengatakan, hujan mengakibatkan sejumlah sungai di Purworejo meluap.

”Akibatnya air menggenangi kawasan permukiman, antara lain di Kecamatan Gebang, Bayan, Purwodadi, dan Bagelen,” ungkapnya kepada KR. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Dulang dan Sungai Bogowonto. Genangan banjir akibat luapan Sungai Dulang terjadi di Desa Seren, Gintungan, dan Lugosobo di Kecamatan Gebang. Luapan Sungai Dulang menyebabkan banjir di Desa Tangkisan, Krandegan, dan Pogung Juru Tengah, di Kecamatan Bayan. Aliran sungai itu tidak mampu menampung debit hingga limpas menggenangi areal persawahan dan permukiman di desa-desa tersebut.

Menurut Budi, genangan di Desa Seren, Gintungan, dan Lugosobo sudah surut pada Rabu pagi dan warga sudah bisa beraktivitas normal. ”Genangan msih terjadi di di Desa Tangkisan, Krandegan, Pogungrejo, Pogung Kalangan, dan Pogung Juru Tengah. Banjir memang mulai surut, tapi butuh waktu beberapa jam hingga kering, karena air belum bisa lancar mengalir kembali ke Sungai Dulang,” terangnya.

Warga di desa terdampak sempat melakukan pengungsian secara mandiri, namun sebagian besar sudah kembali ike rumah untuk membersihkan sisa genangan. ”Sampai Rabu siang, ada sekitar 70 jiwa di Desa Pogung Juru Tengah yang mengungsi di masjid setempat, tapi jika melihat air yang mulai surut, diperkirakan Rabu sore mereka sudah kembali ke rumah,” paparnya.

Adapun genangan akibat luapan Sungai Bogowonto, sempat menyebabkan genangan di Desa Ketangi, Jenar Wetan, Karangasari, Kebonsari, Banjarsari, di Kecamatan Purwodadi. Sedikitnya 30 warga Dusun Bojong Desa Bapangsari, sempat mengungsi di masjid setempat. ”Untuk logistik, warga membuka dapur umum mandiri tapi untuk membantu mencukupi kebutuhan, Tagana Dinsos Purworejo juga buka dapur umum,” paparnya. **(Jas)**



KR-Jarot Sarwosambodo  
**Relawan mengevakuasi warga terdampak banjir di Dusun Bojong, Bapangsari.**

Bapemperda Gelar Public Hearing Raperda Pengarusutamaan Gender



**GROBOGAN (KR)** - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Grobogan, Rabu (29/5) lalu, menggelar public hearing dengan sejumlah elemen masyarakat dalam rangka menyusun Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengarusutamaan Gender. Publik hearing berlangsung di Ruang Rapat Paripurna I DPRD Grobogan. Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Grobogan Hj Lusia Indah Artani SE, dengan mengundang jajaran OPD terkait, beberapa organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tim Kemenkumham Kanwil Provinsi Jateng.

Acara yang menghadirkan nara sumber Dr Indra Kertati MSi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran masyarakat dalam bentuk masukan baik lisan maupun tertulis guna kesempurnaan Raperda yang sedang disusun.

Menurut Ketua Bapemperda Lusia Indah Artani, tujuan public hearing untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap raperda inisiatif DPRD tentang Pengarusutamaan Gender tersebut. Sehingga isi raperda tersebut diharapkan bisa diterima masyarakat luas.

”Bapemperda DPRD Grobogan berinisiasi menyusun Raperda ini karena memandang perlunya payung hukum sebagai dasar perangkat daerah dalam menyelenggarakan kesetaraan gender. Untuk Bapemperda memerlukan masukan dan usulan dari masyarakat. Setiap masukan, usulan atau saran yang disampaikan dalam forum ini, akan ditampung dan kemudian akan didiskusikan lagi secara konkrit saat pembahasan Raperda selanjutnya,” ujar politisi PDIP ini.

Menurutnya, pengarusutamaan gender bertujuan agar perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program dapat berprespektif gender, sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan. ”Dalam Raperda tentang Pengarusutamaan Gender tersusun dalam X Bab, dan 50 Pasal. Di sinilah kita bisa membahas, sekaligus memberi masukan dan usulan,” ujar Lusia.

Sementara itu, Dr Indra Ketati MSi, mengakui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terda-

pat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi peningkatan pengintergrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.

”Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender,” terangnya. Pihaknya sepakat isi Raperda Grobogan tentang Pengarusutamaan Gender.

Di raperda tersebut antara lain disebutkan, bahwa Pengarusutamaan Gender dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, inklusi, partisipatif, non diskriminatif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan sinergitas. **(Tas)**



KR-M Taslim  
**Rapat dengar pendapat umum (public hearing) Bapemperda DPRD Grobogan dalam rangka menyusun Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.**

Stok Gas Cukup, Pengawasan Ditingkatkan

**MAGELANG (KR)** - Dari sisi ketersediaan, keberadaan gas mencukupi dan tidak ada masalah, baik gas maupun Pertalite atau Pertamina. Meski demikian, masih ditemui adanya antrean di SPBU tertentu, khususnya di luar Jawa.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada wartawan di sela-sela kegiatan di Hotel Atria Magelang, diantaranya berupa sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang dihadiri Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Rabu (1/6).

Karding juga berharap adanya suatu sistem yang lebih bagus di bidang pengawasan. Misalnya, manakala kendaraan yang sama tersebut sudah membeli, tidak dapat membeli BBM lagi di hari itu. Selain itu, juga perlu ada koordinasi dengan penegak hukum agar dapat dibantu agar tidak terjadi. Kalau masyarakat sampai antre, apalagi tidak mendapatkan BBM akan berpengaruh pada kegiatan ekonominya. Juga di bidang industri.

Karding mengusulkan sistem tersebut seperti suatu aplikasi, seperti di jalan tol. Saat kendaraan datang, plat nomor akan langsung tercatat pada sistem. Sistem akan langsung berbunyi, sehingga tidak dapat melakukan 2 kali.

Karding merasa yakin kalau pihak Pertamina dan BPH Migas sudah memiliki rencana-rencana, tinggal pengaplikasian dan pengawasan yang perlu lebih diperketat.

Kunjungan ke SPBU Armada Mertoyudan Magelang juga dilakukan, Rabu. Dalam kesempatan ini Karding melakukan pengecekan apakah sistem yang dipakai cukup mampu mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan, misalnya penyalahgunaan, atau berlebihan terhadap solar atau BBM subsidi.

Dalam kunjungannya ini diketahui kalau sudah diterapkannya aplikasi, yang basisnya nomor handphone (HP) dan plat nomor kendaraan.

Didampingi Sales Branch Manager MOR IV PT Pertamina (Persero) Magelang Hendra Saputra maupun lainnya, Karding mengatakan hal ini suatu hal yang perlu diapresiasi, lebih langkah maju. Akan terus dicari metode atau sistem atau aplikasi yang efektif benar-benar mengurangi atau menghilangkan permainan soal distribusi dan penyaluran BBM maupun gas. Karding juga berharap untuk lebih ditingkatkan bidang pengawasannya. **(Tha)**

Generasi Muda Songsong Kebangkitan Pariwisata

**SEMARANG (KR)** - Fakultas Bahasa dan Budaya Asing (FBBA) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata (LSPP) Raflesia Lampung dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi Bidang Pariwisata (pemandu wisata) di kampus Unimus, Minggu (29/5).

Dekan FBBA Unimus Muhimatul Ifadah MPd didampingi Ketua Program Studi S1 Sastra Inggris Heri Dwi Santoso MPd kepada pers di sela sela ujian kompetensi (sertifikasi) tersebut menyampaikan uji sertifikasi diikuti 50 peserta.

Terdiri dari mahasiswa dan dosen Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa dan dosen prodi S1 Sastra Inggris dan beberapa orang lainnya dari luar kampus Unimus.

”Setelah dua tahun lebih pariwisata Indonesia terganggu aktivitas nya (agak lesu) karena Covid-19, kini mulai bergairah kembali sejalan dengan menurunnya Covid-19. Sehingga dunia kerja bidang pariwisata mulai kembali membutuhkan banyak pekerja bidang pariwisata, termasuk pemandu wisata,” ujar Dekan FBBA Muhimatul Ifadah MPd.

Menurutnya, bentuk uji sertifikasi kompetensi dengan kerjasama FBBA Unimus, BSNP dan LSPP Raflesia ini sebagai imple-

mentasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diterapkan di FBBA Unimus. Mahasiswa FBBA Unimus pun siap berpartisipasi dan ambil bagian dalam uji sertifikasi ini.

”Generasi muda, termasuk para mahasiswa FBBA Unimus siap menyongsong kebangkitan kembali pariwisata Indonesia sejalan dengan menurunnya Covid-19. Caranya dengan mengikuti uji kompetensi pariwisata, khususnya bidang ’tour guide’ atau pemandu wisata. Mereka siap menyongsong tumbuhnya kembali pariwisata Indonesia setelah pandemi melalui cara membekali diri dengan ikut uji sertifikasi,” ujar Muhimatul Ifadah MPd.



KR-Sugeng Irianto  
**Kaprodi S1 Sastra Inggris, Direktur LSPP, Dekan FBBA pada acara pembukaan uji sertifikasi.**

Anak Didik Bedakan Guru ASN dan Honorer

**SALATIGA (KR)** - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Salatiga Zaenuri menyatakan ke depan PGRI butuh perhatian khusus dari Pemerintah Kota Salatiga. Terlebih jumlah anggota PGRI di Salatiga hingga 2022 ini mencapai 3.200 guru.

”Perlu dipertimbangkan untuk mengangkat separuh dari guru honorer untuk menjadi ASN. Sebab Status guru honorer dan status guru ASN ternyata dibedakan oleh anak didik, sehingga ini sangat membahayakan iklim pendidikan,” kata Zaenuri saat halal bihalal PGRI Salatiga di Pemkot Salatiga, Senin (30/5).

Ia menambahkan, PGRI sebetulnya anti demo, kecuali terpaksa seperti beberapa waktu lalu saat demo UU Guru dan Dosen. Ketua PGRI Salatiga ini berharap rencana pembangunan ruang laboratorium komputer untuk peningkatan SDM guru bisa diwujudkan karena sempat tergeser penanganannya karena pandemi Covid-19.

Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng Nugroho Rachmadi menyatakan mendukung PGRI Salatiga. ”Kami akan mendukung penuh program PGRI di Salatiga ini. Saya paham dengan kode-kode apa program PGRI,” tandas Sinoeng.

Hadir pada halal bihalal ini, segenap anggota Forkopimda Salatiga, Sekda Wuri Puji Astuti, Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Salatiga Mintahuddin, serta mantan pejabat Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

Ketua PGRI Jateng Muhdi mengingatkan potensi sangat besar yang akan dicapai Salatiga jika PGRI bekerja secara sungguh-sungguh. Salatiga adalah kota yang luar biasa karena dikaruniai Allah berbagai keistimewaan dari dikelilingi gunung, serta lahan subur. Banyak prestasi yang diraih kota ini, hingga ke depan prestasi akan terus meningkat atas dukungan guru. **(Sus)**



Pemerintah Harus Berdayakan Pelaku UMKM

**WAKIL** Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan, peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada pengembangan perekonomian daerah sangat signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19 pada 2020-2021, banyak UMKM yang bertahan dan masih mampu menyumbang pendapatan asil daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ’UMKM Berdaya, Jateng Sejahtera’, di Surakarta, Rabu (31/5). Dengan kemampuan bertahan yang dimiliki UMKM Jateng ini, DPRD Jateng minta kepada pemerintah agar terus melakukan pembinaan dan mengembangkan sektor UMKM supaya mereka benar-benar menjadi penguat ekonomi daerah dan nasional.

Peran pemerintah sangat penting bagi para pelaku UMKM. Saat pandemi yang dibarengi dengan pembatasan aktivitas masyarakat, semua pelaku UMKM harus menerima dampak yang cukup serius.

Aktivitas dibatasi, permintaan menurun, omzet tak ada yang masuk. Dalam kondisi seperti ini UMKM butuh sandaran untuk mendapatkan solusi agar usaha yang mereka rintis tidak gulung tikar. Dengan demikian, kehadi-



KR-Budiono  
**Quatly Abdulkadir Alkatiri**

ran pemerintah sangat diperlukan. Setidaknya ada solusi apakah berbentuk pemberian bantuan modal atau pemasaran produk UMKM.

Dewan menilai untuk pemberdayaan UMKM tidak lepas dari persoalan permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Ketiga unsur ini harus ada dan terus berkesinambungan.

Untuk bisa bersaing, tidak ada artinya kalau tidak ada modal. Apalagi kalau UMKM kesulitan untuk mendapatkan bahan baku produk. Jika soal permodalan dan bahan baku sudah tidak menjadi persoalan, masih harus ditinjau dengan pemasaran yang bagus, baik itu promosi maupun penjualan.

Dinamika yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Permasalahan modal yang kurang, bahan baku terbatas dan pemasaran tidak bisa maksimal. DPRD Jateng yakin Pemerintah sudah memetakan masalah ini. Sekarang tinggal bagaimana mencari solusi yang tepat dan bisa dijalankan oleh para pelaku UMKM di Jateng. (\*)

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)